

Laporan Penelitian

**KEMERATAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
1992-2012**



**Oleh :
ASTUTI RAHAYU, SE., M.Si
NPY: 2 7209 97 0173 1**

**FAKULTAS EKONOMI
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

1. a. Judul : Kemerataan Pendidikan di Indonesia 1992-2012
- b. Bidang Ilmu : Ekonomi
2. Dosen Pelaksana
 - a. Nama : Astuti Rahayu, SE., M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NPY : 2 7209 97 0173 1
 - d. Gol/Pangkat : III/c
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas/Prodi : Ekonomi / Ekonomi Pembangunan
 - g. Alamat : Jl.SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta

Yogyakarta, 19 Januari 2015

Mengetahui
Fakultas Ekonomi
Dekan



Dr. Muafi, SE., M.Si
NPY : 2 7104 99 0209 1

Peneliti



Astuti Rahayu, SE., M.Si
NPY : 2 7209 97 0173 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset utama dari kebanyakan kaum miskin, investasi dalam modal manusia (*human capital*) merupakan cara yang kuat untuk mempertinggi kualitas asset mereka, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah meratakan distribusi pelayanan pendidikan kepada masyarakat (Thomas, et.al., 2000: 49).

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan, karena merupakan investasi untuk meningkatkan SDM, memperkuat modal fisik, dan kemampuan menyesuaikan kemampuan teknik yang diterapkan pada mesin-mesin industri. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi pendidikan untuk memberikan bekal pada tenaga kerja agar mempunyai kemampuan adaptasi, memiliki keahlian yang dibutuhkan pasar, mengembangkan sikap yang mudah menerima informasi, sehingga pada akhirnya akan memiliki kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bangsa (*World Development Report, 1996:123*).

Disparitas atau perbedaan dalam pendidikan merupakan salah satu dari banyak aspek pendidikan, namun perbedaan itu juga terkait dengan alokasi investasi publik yang tidak tepat, perang, kekayaan, jurang, antar-*gender*, dan krisis ekonomi. Banyak penelitian yang menemukan bahwa pendidikan orang tua, pendapatan rumah tangga, maupun kekayaan mempengaruhi pencapaian prestasi pendidikan anak-anak. Masyarakat peduli dengan ketidakseimbangan distribusi pendidikan karena langsung mempengaruhi kesejahteraan mereka. Distribusi pendidikan mempunyai implikasi kuat terhadap dampak pertumbuhan yang dapat mengurangi kemiskinan.

Agar pendidikan lebih merata, sejak tahun 1980, Negara Sedang Berkembang (NSB) melakukan investasi yang cukup besar dalam pelayanan pendidikan. Namun pengeluaran pemerintah yang lebih besar untuk pendidikan jika dialokasikan secara tidak tepat mungkin hanya sedikit sumbangnya terhadap pengurangan kemiskinan, bahkan sebaliknya justru memperbesar ketimpangan. Selama ini kemajuan belum merata di banyak Negara, karena kurangnya akses terhadap pendidikan dasar yang masih menjadi tantangan besar. Meskipun pengeluaran publik yang lebih besar merupakan salah satu cara untuk meningkatkan cara untuk meningkatkan hasil pendidikan, namun pengeluaran publik yang lebih besar saja tidak cukup karena perbedaan kualitas pendidikan di banyak Negara (Thomas et., al., 2000b: 51).

Di Indonesia, peningkatan kualitas SDM bertitik tolak pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Sejak awal Repelita IV, pemerintah berhasil mencanangkan program Wajib Belajar 6 Tahun yang berhasil meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah, dalam pendidikan dasar. Jangkauan wajib belajar semakin diperluas menjadi Wajib Belajar 9 Tahun pada awal Repelita VI. Dengan program ini diharapkan dalam jangka waktu 10 tahun hampir semua penduduk yang berusia sekitar 7-15 tahun mengikuti jenjang pendidikan dasar. Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan pada tingkat makro adalah kemampuan baca tulis penduduk dewasa (SUSENAS, 2000).

Menurut SUSENAS tahun 2012, angka melek huruf penduduk Indonesia sebesar 98,94%. Artinya, masih ada 1,06% penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf. Sedangkan angka buta huruf tahun 2010-2012 berdasar kelompok umur, dan terlihat angka buta huruf masih banyak terdapat pada kelompok umur usia tua, seperti yang disajikan di Tabel 1..

Ukuran lain tingkat pendidikan adalah rata-rata lama bersekolah (tahun) . secara umum, indicator ini menunjukkan jenjang pendidikan yang dicapai oleh penduduk dewasa. Dengan rata-rata bersekolah 7,6 tahun pada tahun 2010, menunjukkan bahwa penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Indonesia baru pada tahap memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD).

Tabel 1.
Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur Tahun 2010-2012 (%)

Kelompok Umur	2010	2011	2012
10 tahun +	6,34	6,44	6,02
15 tahun +	7,09	7,19	6,75
15-44 tahun	1,71	2,30	2,00
45 tahun +	18,25	17,89	17,20

Sumber : SUSENAS, 2010-2012

1.2. Perumusan Masalah

Upaya untuk mempelajari jangkauan layanan pendidikan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan distribusi pada pemanfaatan fasilitas pendidikan, sehingga semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Dengan pendidikan yang lebih merata, diharapkan rata-rata tahun bersekolah masyarakat meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas SDM. Dengan demikian, akan memperbaiki kesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan dan akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. apakah upaya yang dilakukan selama ini sudah mencakup pemerataan pendidikan di Wilayah Indonesia?
2. bagaimana pengaruh rata-rata tahun bersekolah dan penyebaran pendidikan terhadap Indeks Gini Pendidikan?
3. apakah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita yang merupakan cerminan dari kesejahteraan akan meningkat jika Indeks Gini Pendidikan membaik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah:

1. mengukur di Indonesia

2. menggambar Kurva Lorenz Pendidikan per propinsi di Indonesia
3. mengetahui pengaruh rata-rata tahun bersekolah dan penyebaran (perluasan) pendidikan terhadap Indeks Gini Pendidikan di Indonesia
4. mengetahui pengaruh faktor Indeks Gini Pendidikan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita di Indonesia.

1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pihak yang berkepentingan, baik kalangan pemerintah maupun akademisi, untuk strategi pembangunan di masa datang.

1.5. Keaslian Penelitian

Banyak penelitian telah dilakukan, yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maupun pemerataan pendidikan. Banyak penelitian yang sudah fokus pada peningkatan pendidikan dan pembangunan, dan memberikan hasil yang bervariasi, maupun hasil yang hamper mirip. Penelitian terdahulu diantaranya seperti disajikan pada Tabel 2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDRB sebagai variabel dependen, sedangkan Indeks Gini Pendidikan (IGP) sebagai variabel independen, yang sebelumnya dihitung dulu nilai IGP. Lokasi yang diteliti di Indonesia selama kurun waktu 1992-2012.

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

Peneliti, Judul	Lokasi	Alat Analisis	Hasil
Siregar, Wahyuniarti (2008)	Indonesia, 1995-2005	Ekonometrika, Panel data	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap penduduk miskin, penduduk berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, agrishare berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, dan industrishare berpengaruh negatif terhadap penduduk miskin
Agrawal (2008)	Prop. Kazakhstan	Panel data	Upah riil berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, ketimpangan berpengaruh positif terhadap kemiskinan
Atik Ismuningsih (2011)	DIY	Panel data	Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, tingkat melek huruf tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan, dan distribusi pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan
Ramon Lopez, Vinod Thomas, Yan Wang	Meksiko	Panel data	Ketimpangan pendidikan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan

Sumber: Hasil ringkasan beberapa penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang ketimpangan pendidikan sudah banyak dilakukan oleh ahli ekonomi, dengan mengambil banyak bentuk penelitian di berbagai negara yang menempatkan paradigma pendidikan sebagai salah satu modal utama pembangunan. Vinod Thomas, Yang Wang, Xibo Fan (2000) mengukur ketimpangan pendidikan dengan menggunakan data panel. Penelitian dilakukan untuk 85 negara dengan periode waktu 5 tahunan mulai tahun 1960 hingga tahun 1990. Kesimpulan yang didapat antara lain sebagai berikut (Thomas, et.al, 2000a : 26) :

1. Ketimpangan pendidikan telah menurun di kebanyakan negara selama 3 dekade yaitu 1960 – 1990, dengan pengecualian di Colombia, Honggaria, Peru, dan Venezuela yang naik pelan sejak 1980.
2. Ada hubungan negatif dan signifikan antar ketimpangan pendidikan dengan rata-rata tahun bersekolah
3. Kurva Kuznets akan terlihat nyata, jika data digunakan adalah standar deviasi pendidikan.
4. Jurang gender dalam pendidikan semakin kuat.

Penelitian lain yang juga memfokuskan pada distribusi pendidikan dan pertumbuhan adalah dari Roman Lopez, Vinod Thomas, dan Yang Wang dengan menggunakan data setiap 5 tahun (quinquennial) dari 20 negara yang kebanyakan berpendapatan menengah. Penelitian ini mengestimasi fungsi produksi dengan pendidikan yang tak dapat diperdagangkan, setelah di kontrol dengan modal fisik, tenaga kerja, dan koefisien Gini yang diestimasi dengan data pencapaian prestasi. Penelitian ini menggunakan data tahun (1970-1994), dan hasilnya adalah (Lopez;et., al, 1998:22).

1. Distribusi pendidikan menentukan tingkat pendapatan maupun pertumbuhan.
2. Dengan menggunakan deviasi standar dalam logaritma sebagai ukuran lain penyebaran pendidikan, ternyata memberikan efek yang besar pada pendapatan per kapita. Kebanyakan dari koefisien sangat signifikan. Distribusi dari pendidikan dan akses yang sama pada pendidikan merupakan kunci. Distribusi yang tak sama di bidang pendidikan, akan mempunyai kecenderungan negatif pada pendapatan per kapita. Hal lain yang penting adalah adanya hubungan antara kebijakan pendidikan dan kebijakan ekonomi pembuat kebijakan ekonomi harus mengukur bahwa investasi di bidang pendidikan termasuk pemerataan pendidikan merupakan hal penting untuk kesuksesan perekonomian suatu negara.
3. Keterbukaan dan reformasi perdagangan memperbaiki produktivitas modal manusia dalam model-model pertumbuhan.

Lopez meninjau faktor-faktor & mekanisme yang mendorong terjadinya ketimpangan di Meksiko, dan membuktikan bahwa ketimpangan pendidikan mengakibatkan kanvareasi yang besar dalam ketimpangan pendapatan di Meksiko (Lopez, 2001:45). Meski tingkat pencapaian pendidikan telah berkembang cepat, meski telah mengalami perubahan yang nyata pada tingkat ketimpangan pendapatan selama periode analisis. Sebagian besar memburuknya distribusi pendapatan total terjadi pada pertengahan sampai akhir tahun 1980. Kontribusi pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Meksiko merupakan yang kedua di Amerika Latin. Apa yang nampak sangat menarik dalam pengalaman Meksiko tersebut adalah fakta bahwa arti penting pendidikan terus meningkat sepanjang waktu. Tetapi ketimpangan pendapatan bukan merupakan hasil dari memburuknya distribusi pendidikan, sebagaimana perilaku pendapatan yang berhubungan dengan tingkat pengembalian pendidikan semakin nyata. Ini berarti bahwa perubahan pada peningkatan tenaga

kerja dengan tingkat keahlian tinggi tak sesuai dengan peningkatan penawaran. Keadaan ini mungkin terjadi sebagai akibat dari cepatnya perubahan teknologi dengan keahlian yang bias yang perubahannya di Meksiko dipermudah dengan meningkatnya keterbukaan ekonomi.

Analisis empiris dilakukan oleh Barro dengan menggunakan School Enrollment Rates sebagai Proxy untuk Sumber Daya Manusia. Tingkat pertumbuhan berkorelasi secara negatif dengan GDP perkapita pada kondisi awal. Selain itu Barro juga mendukung hipotesis Conditional Convergence pada model pertumbuhan Neoklasik.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Indeks Gini Pendidikan

Menurut tulisan Angus Deaton (1997), perhitungan Indeks Gini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu metode langsung dan tak langsung. Metode langsung dilakukan dengan cara memasukan data ke dalam rumus sebagai berikut:

(Thomas, et. al. 2000a : 7 – 12)

$$IGP = \frac{1}{\mu N(N-1)} \sum_{i=1}^N \sum_j [y_i - y_j]$$

Keterangan :

IG : indeks Gini

R : rata-rata variabel (misal: pendapatan)

N : jumlah total observasi

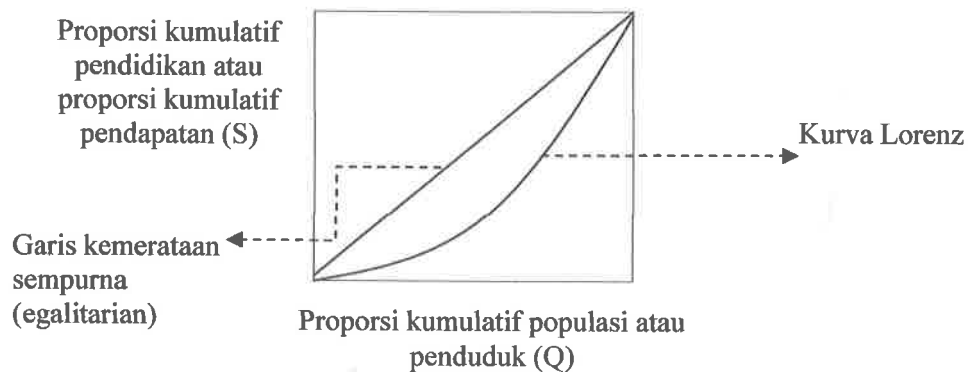
Untuk Gini pendapatan, Y_i dan Y_j adalah nilai pendapatan individu.

Untuk Gini pendidikan, Y_i dan Y_j adalah tahun pencapaian sekolah.

Perhitungan Indeks Gini dengan metode tak langsung dikenal dengan Kurva Lorenz, dengan sumbu tegak presentase kumulatif tahun pendidikan untuk Gini pendidikan dan persen kumulatif pendapatan untuk Gini pendapatan, sedangkan

sumbu horizontal adalah persentase kumulatif populasi. Koefisien Gini didefinisikan sebagai rasio daerah yang dibentuk oleh Kurva Lorenz dan garis 45 derajat, dengan daerah segitiga di bawah garis 45 derajat. Indeks Gini pendidikan digambarkan dengan Kurva Lorenz berikut:

$$\text{Gini} = \frac{\text{Area A (antara garis egalitarian dan Lorenz)}}{\text{Area OWQ (segitiga egalitarian)}}$$



Gambar 1

Kurva Lorenz Pendidikan

2.2.2. Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Upaya pembangunan ekonomi di negara berkembang umumnya lebih diarahkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Kenaikan pendapatan perkapita. Dengan asumsi dasar tersebut, para ekonomi sering memberi pengertian tentang istilah pembangunan ekonomi sebagai :

1. Upaya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yang dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu tahun tertentu dikurangi dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
2. Upaya pengembangan PDB dalam suatu negara yang dibarengi oleh perombakan dan modernisasi struktur ekonominya (Arsyad,1997;7). Definisi

lain dan pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita (Suparmoko, 1996;5).

Pengertian pembangunan ekonomi tidak sama dengan pengertian pertumbuhan ekonomi maupun perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDR tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad,1999;7). Sedangkan menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi adalah perubahan spontan atau terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa berubah dan mengganti jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk (Jhinghan,1999;4). Istilah pembangunan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi di negara-negara maju

Tujuan pembangunan ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan perkapita juga untuk meningkatkan produktivitas (Suparmoko,1996;5) Produktivitas di tunjukkan oleh output yang dihasilkan. Faktor-taktor yang mempengaruhi tingkat output antara lain di tentukan oleh tersedianya atau digunakannya sumber daya alam dan sumber daya manusia, tingkat teknologi modal dan keadaan pasar serta sistem perekonomian. Sedangkan Todaro mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur hidup dan kelembagaan selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Oleh karena itu maka pengertian pembagunan ekonomi pada umumnya merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, yang mempunyai tiga sifat penting, yaitu (Sukirno,1981;13) :1). Suatu proses berarti perubahan yang terjadi secara

terus menerus, 2). Usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan perkapita, dan 3). Kenaikan pendapatan terus berlangsung dalam jangka panjang

Pembangunan atau perkembangan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian di samping kenaikan output. Perkembangan atau pembangunan disertai dengan pertumbuhan tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan perkembangan.

2.2.2.1. Pendidikan

Pendidikan (dan kesehatan) merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Terlepas dari hal-hal lain kedua hal tersebut merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, sementara pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan (dan kesehatan) adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas. Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peranan utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara berkembang dapat menyerap teknologi dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kesehatan merupakan prasyarat untuk peningkatan produktivitas, sementara pendidikan juga harus bertumpu pada kesehatan yang baik. Sehingga pendidikan dan kesehatan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital. Peran pendidikan dan kesehatan sebagai input atau output menyebabkan dua hal ini sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara.

2.2.2.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu timbul dalam proses pembangunan suatu negara. Meski banyak program ditunjukkan untuk penghapusan kemiskinan, namun masalah ini tak kunjung selesai. Sulitnya

penyelesaian masalah kemiskinan disebabkan permasalahan yang melibatkan penduduk miskin sangat kompleks.

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro,2003:123). Berdasarkan definisi tersebut yang menjadi permasalahan dalam kemiskinan adalah standar hidup. Seseorang atau sekelompok masyarakat miskin akan mempunyai daya aksesibilitas (di sini berarti kemampuan untuk dapat mencapai atau mendapatkan sesuatu yang sebenarnya merupakan kebutuhan dasarnya dan seharusnya menjadi haknya sebagai manusia dan warga negara) yang rendah dan terbatas dibandingkan dengan golongan menengah atau golongan kaya. Akses-akses yang tidak bisa didapat oleh masyarakat miskin meliputi (Wibowo,2003:27):

1. Akses untuk mendapatkan makanan yang layak.
2. Akses untuk mendapatkan sandang yang layak.
3. Akses untuk mendapatkan rumah yang layak.
4. Akses untuk mendapatkan layanan kesehatan.
5. Akses untuk mendapatkan layanan pendidikan.
6. Akses kepada *leisure* dan *entertainment*.
7. Akses untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak

Secara umum masyarakat miskin dapat digambarkan sebagai berikut (Jendela,2002:10)

1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*)
2. Tidak mampu melakukan kegiatan produktif (*unproductiveness*)
3. Tidak mampu menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi (*inaccessibility*)
4. Tidak mampu menentukan nasib sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, punya perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistic (*vulnerability*)

5. Tidak mampu membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa punya martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*)

Kemiskinan tidak mutlak hanya milik NSB, kemiskinan merupakan masalah universal yang dihadapi oleh semua negara termasuk negara-negara maju. Di negara maju masih terdapat jutaan orang hidup miskin dan mereka yang hidup tidak miskin relatif masih miskin dibandingkan dengan yang lain. Dari hal tersebut dimengerti bahwa kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Kuncoro,2003:121).

Konsep kemiskinan absolut mengidentifikasi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (*poverty line*: yaitu besarnya satuan uang yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan hidup minimum untuk makanan maupun bukan makanan) tertentu yang berbeda antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya akibat perbedaan pola konsumsi, pendapatan, ketersediaan barang jasa dan sebagainya. Dari penetapan *poverty line*, masyarakat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) masyarakat miskin jika masyarakat berada dibawah *poverty line*, (2) masyarakat menengah jika berada di *poverty line*, (3) masyarakat kaya jika berada diatas *poverty line*.

Sedangkan kemiskinan relatif merupakan pangsa pendapatan nasional yang diterima masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro,2003:122). Sehingga kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak mudah untuk dapat dihapuskan, meskipun kemiskinan absolut dapat dihilangkan tetapi secara otomatis kemiskinan relatif dapat dihapuskan.

2.2.2.3. Indikator Kemiskinan

Ukuran kemiskinan berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lain dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini karena sangat tergantung kebiasaan atau adat, geografis daerah dan standar kebutuhan hidup. Garis kemiskinan yang

berdasarkan pola konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kebutuhan masyarakat sehari-hari (Kuncoro,2003:123)..

Indikator kemiskinan atau garis kemiskinan di Indonesia ada bermacam-macam. BPS menggunakan batas kemiskinan dan besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita perbulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Untuk makanan digunakan patokan 2100 kalori perkapita hari.

Sementara profesor Sajogyo mendasarkan garis kemiskinan pada harga beras yaitu sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras, dalam artian konsumsi tersebut ekuivalen dengan harga beras.

Sementara Hendra Esmara, yang mencoba menetapkan suatu garis kemiskinan pedesaan dan perkotaan dipandang dari sudut pengeluaran actual pada sekelompok barang dan jasa esensial seperti yang diungkapkan secara berturut-turut dalam Susenas (Kuncoro,2003:153).

2.2.3. Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theory*)

Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa pembangunan pendidikan mempunyai peranan dalam pembangunan nasional atau pembangunan ekonomi. Permasalahan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai kaitan yang erat dan rumit dengan berbagai bidang lain: ideologi, agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, terutama demografi. Permasalahanya menjadi lebih kompleks karena semua kelompok masyarakat dapat mengemukakan pendapat mengenai bagaimana pendidikan ini harus diatur, mereka paling sedikit pernah menyekolahkan anaknya, sehingga merasa atau mempunyai pandangan tentang bagaimana pendidikan harus dijalankan lebih dari sekedar menyekolahkan anaknya.

Pertanyaan yang sering muncul adalah teori apa yang dapat digunakan sebagai landasan analisis. Teori tersebut seharusnya dapat memberikan penjelasan tentang pembangunan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dengan latar belakang ilmu ekonomi, maka teori yang dapat menjelaskan permasalahan pendidikan adalah ekonomi pembangunan.

Teori pertumbuhan yang baru menyajikan suatu kerangka teoritis untuk menganalisis apa yang disebut sebagai pertumbuhan endogen atau proses pertumbuhan GNP yang bersumber dari suatu sistem yang mengatur proses produksi. Model-model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa pertumbuhan GNP itu sebenarnya merupakan suatu konsekuensi alamiah atas adanya keseimbangan jangka panjang. Motivasi pokok tumbuhnya teori baru ini adalah untuk menjelaskan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar negara dan mengapa konsep pertumbuhan itu sendiri sedemikian penting. Secara lebih spesifik, pertumbuhan endogen berusaha menjelaskan berbagai faktor yang menentukan besar-kecilnya μ , tingkat pertumbuhan GDP yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat eksogen (Todaro, 2000 : 122).

Sebenarnya, model-model pertumbuhan endogen, secara struktural memiliki sejumlah kesamaan dengan model-model neoklasik tradisional. Hanya saja, asumsi dasar yang dianutnya sama sekali berbeda. Oleh karena itu, kesimpulan-kesimpulan yang didapatnya juga, sangat berlainan. Model-model pertumbuhan endogen menolak asumsi penyusutan imbalan marjinal atas investasi modal (*diminishing marginal returns to capital investment*) yang dipegang teguh oleh model-model neoklasik; model pertumbuhan endogen menyatakan hal sebaliknya, yakni bahwa hasil investasi justru akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar (itu berarti negara-negara maju menawarkan hasil atau keuntungan investasi yang lebih tinggi) lebih lanjut, model ini juga memberikan perhatian yang besar kepada peranan eksternalitas dalam penentuan tingkat hasil investasi permodalan. Dengan mengasumsikan bahwa investasi swasta dan publik (pemerintah) di bidang sumber daya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu peningkatan produktivitas yang mampu mengimbangi

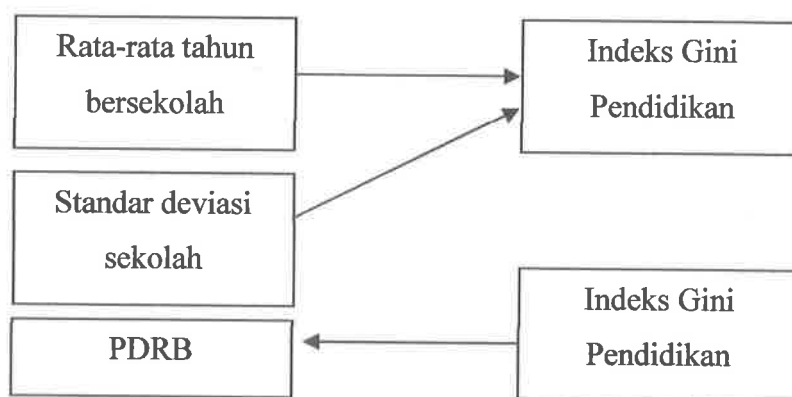
kecenderungan alamiah penurunan skala hasil, model pertumbuhan endogen ini mencoba menjelaskan terjadinya divergensi pola pertumbuhan ekonomi antar negara dalam jangka panjang. Dan meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa faktor teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kunci dari model pertumbuhan endogen adalah tidak adanya *dimishing returns to capital*. Versi paling sederhana dari fungsi produksi tanpa *dimishing returns to capital* adalah fungsi AK (Barro dan Martin, 1995:39).

$$Y = AK$$

Dimana A adalah konstanta positif yang mencerminkan tingkat teknologi. Ketiadaan *dimishing returns to capital* mungkin terlihat tidak realistis, tetapi hal tersebut menjadi masuk akal jika K memasukkan unsur sumber daya manusia yang ada. Output per kapitanya adalah $y = Ak$, dan produk marginal dan rata-rata kapital tersebut konstan pada tingkat $A > 0$. Dalam hal ini y adalah Y/L yang merupakan output per kapita. Sedangkan k adalah K/L yang merupakan rasio kapital - tenaga kerja.

2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 3

Kerangka Pemikiran

Pada hakekatnya di seluruh negara baik negara maju maupun negara sedang berkembang termasuk Indonesia, memiliki tujuan yang sama dari usaha pembangunan ekonomi yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur. Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang lebih tinggi dapat dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Karena hal ini merupakan investasi jangka menengah atau panjang yang tidak dapat dirasakan hasilnya dalam sekejap. Perlu waktu bertahun-tahun untuk memetik hasil dari investasi di bidang pendidikan. Untuk itu, rata-rata tahun bersekolah harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa layanan pendidikan bagi masyarakat sudah merata atau belum, meskipun rata-rata belum merupakan ukuran yang sempurna untuk melihat pemerataan. Hasil yang diharapkan adalah semakin meratanya layanan pendidikan, yang bisa dilihat dari semakin kecilnya nilai indeks gini pendidikan (IGP).

Ketika IGP sudah mengecil, maka diharapkan akan dapat memberikan sumbangan yang lebih tinggi bagi peningkatan produktivitas di setiap kegiatan ekonomi. Ketika produktivitas meningkat akan mengakibatkan naiknya output yang dihasilkan. Dan ini akan terlihat dari semakin tingginya PDRB. Sehingga dengan adanya peningkatan PDRB, maka ada peningkatan pembangunan, peningkatan kualitas hidup (*quality of life*), pertumbuhan ekonomi, perbaikan pendapatan, rendahnya tingkat kemiskinan, pengangguran, pencapaian pendidikan yang lebih baik, berkurangnya masalah sosial maupun minimalnya kerusakan lingkungan, sehingga pembangunan ekonomi berkelanjutan terlaksana guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan keadilan pada setiap generasi.

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Rata-rata tahun bersekolah (R) dan standar deviasi sekolah (S) mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Indeks Gini Pendidikan (IGP).
2. Indeks Gini Pendidikan (IGP) mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut meliputi: PDRB per kapita atas dasar harga konstan 1993 per propinsi, jumlah penduduk 10 tahun ke atas dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan per propinsi, serta rata-rata pencapaian tahun bersekolah. Pengamatan terhadap penelitian ini dilakukan untuk data *cross section* meliputi 26 propinsi di Indonesia tahun 1992-2012 karena alasan ketersediaan data.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Teori ekonomi sering kali tidak terlalu jelas dalam menjelaskan definisi dan pengukuran variabel. Dalam penelitian empiris, definisi dan cara pengukuran data dari variabel yang diamati harus bersifat operasional agar tujuan penelitian dapat tercapai. (Insukindro, 1992:14). Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel yang digunakan adalah:

1. Indeks Gini Pendidikan (IGP) : merupakan angka antara 0 dan 1 yang mencerminkan pemerataan pendidikan. Semakin mendekati angka 0, pemerataan pendidikan semakin tinggi (baik). Sebaliknya, semakin mendekati 1, pemerataan pendidikan semakin rendah (jelek).
2. Rata-rata tahun bersekolah (R) : merupakan rata-rata lamanya menempuh sekolah (dalam satuan tahun), dari sekolah dasar hingga pendidikan tertinggi yang dapat ditempuh untuk masing-masing populasi yang bersangkutan.
3. Standar deviasi pendidikan (S) : merupakan sebaran pendidikan atau perluasan pendidikan yang diukur dengan standar deviasi pendidikan, yang dihitung berdasarkan rumus standar deviasi.

4. Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB) : merupakan PDRB per kapita propinsi berdasarkan harga konstan tahun 1993.

3.3. Alat Analisis

3.3.1. Indeks Gini Pendidikan

Untuk mencapai tujuan 1 digunakan cara langsung untuk menghitung Indeks Gini Pendidikan Penghitungan Indeks Gini Pendidikan cara langsung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IGP = \left(\frac{1}{v} \right) \sum_{i=2}^n \sum_{j=1}^{i-1} p_i |y_i - y_j| p_j$$

Keterangan :

E = Gini Pendidikan didasarkan pada distribusi pencapaian sekolah

μ = Rata-rata bersekolah dari populasi yang bersangkutan

Pi dan Pj = Proporsi populasi dengan tingkat pencapaian sekolah yang pasti

Yi dan yj = Tahun bersekolah pada tingkat pencapaian pendidikan yang berbeda

n = Jumlah kategori pencapaian sekolah pada data

Dalam penelitian ini sesuai dengan ketersediaan data, maka digunakan n = 6, dengan kategori sebagai berikut : tak bersekolah, tak tamat, SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SMA, Universitas. Dengan adanya 6 kategori pencapaian tingkat sekolah tersebut, maka rumus Indeks Gini pendidikan dapat diperluas sebagai berikut :

$$E = \left(\frac{1}{v} \right) [p_2 (y_2 - y_1)] p_1$$

$$+ p_3 (y_3 - y_1) p_1$$

$$+ p_3 (y_3 - y_1) p_1 + p_3 (y_3 - y_2) p_2$$

$$+ \dots$$

$$+ p_6 (y_6 - y_1) p_1 + p_5 (y_5 - y_2) p_2 + p_4 (y_4 - y_3) p_3 + p_5 (y_5 - y_4) p_4]$$

Keterangan :

P_1 = Proporsi populasi tak bersekolah

P_2 = Proporsi populasi tak tamat SD

P_3 = Proporsi populasi tamat SD

P_4 = Proporsi populasi tamat SLTP

P_5 = Proporsi populasi tamat SMU

P_6 = Proporsi populasi Universitas (kuliah)

Sedangkan rumus penghitungan tahun bersekolah pada 6 tingkatan pendidikan tersebut adalah :

Buta huruf : $y_1 = 0 = 0$ tahun

Tak tamat SD : $y_2 = y_1 + 0,5 \text{ SD} = 1,5 \text{ SD} = 3$ tahun

Tamat SD : $y_3 = y_1 + \text{SD} = \text{SD} = 6$ tahun

SMP : $y_4 = y_3 + \text{SMP} = 9$ tahun

SMU : $y_5 = y_3 + \text{SMU} = 12$ tahun

Universitas : $y_6 = y_5 + \text{Universitas} = 1,5$ tahun

Keterangan :

SD = tahun pendidikan Sekolah Dasar (SD) = 6 tahun

SMP = tahun pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) = 3 tahun

SMU = tahun pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) = 3 tahun

Universitas = tahun pendidikan sekolah di Universitas = 3 tahun (penghitungan tahun pendidikan sekolah di Universitas ini sudah dilakukan dengan 3 cara, yaitu : rata-rata ukur, rata-rata kuadrat, dan rata-rata harmonik, ketiganya memberikan hasil yang hampir sama, sekitar 3,01 sampai dengan 3,2. Dan dibulatkan menjadi 3 tahun).

Rumus rata-rata tahun sekolah (R) sebagai berikut:

$$R = \sum_{i=1}^n p_i y_i$$

Sedangkan standar deviasi sekolah (S) dirumuskan:

$$S = \sqrt{\sum_{i=1}^n p_i (y_i - \mu)^2}$$

Indeks Gini pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendidikan. Menurut Todaro (Todaro, 2000:160) Indeks Gini berkisar antara 0 (kemerataan sempurna) dan 1 (ketidakmerataan sempurna). Lebih kriteria ketidakmerataan Indeks Gini Pendidikan tersebut adalah:

1. Indeks Gini Pendidikan (IGP) lebih dari 0,7 = pemerataan sangat rendah.
2. Indeks Gini Pendidikan (IGP) 0,5–0,7= pemerataan rendah.
3. Indeks Gini Pendidikan (IGP) 0,36 – 0,49 = pemerataan sedang.
4. Indeks Gini Pendidikan (IGP) 0,2 – 0,35 = pemerataan tinggi.
5. Indeks Gini Pendidikan (IGP) kurang dari 0,2 = pemerataan sangat tinggi.

Untuk mencapai tujuan ke-2 yaitu menggambar kurva Lorenz Pendidikan, digunakan perhitungan Indeks Gini dengan metode tak langsung. Sumbu tegak adalah proporsi kumulatif tahun bersekolah (S), sedangkan sumbu horizontal adalah persentase kumulatif populasi (Q). Koefisien Gini didefinisikan sebagai rasio daerah yang dibentuk oleh kurva Lorenz dan garis 45 derajat, dengan daerah segitiga di bawah garis 45 derajat, digambarkan dengan kurva Lorenz seperti diperlihatkan pada gambar 1.

Kurva Lorenz pendidikan pada penelitian ini dibuat dengan cara mengambil proporsi kumulatif populasi pada aksis-aksis horizontal, dan proporsi kumulatif sekolah pada aksis vertikal. Proporsi kumulatif populasi pada masing-masing tingkatan mengikuti perhitungan sebagai berikut:

Tak sekolah	: $Q_1 = P_1$
Tak tamat SD	: $Q_2 = P_1 + P_2$
Tamat SD	: $Q_3 = P_1 + P_2 + P_3$
Tamat SMP	: $Q_4 = P_1 + P_2 + P_3 + P_4$
Tamat SMU	: $Q_5 = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5$

Tamat Universitas : $Q_6 = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = 100\%$

Sedangkan proporsi kumulatif bersekolah pada masing-masing tingkatan sekolah, sebagai berikut:

Tak sekolah : $S_1 = (p_1/y_1) / \mu = 0$

Tak tamat SD : $S_2 = (p_1 y_1 + p_2 y_2) / \mu$

Tamat SD : $S_3 = (p_1 y_1 + p_2 y_2 + p_3 y_3) / \mu$

..... :

Universitas : $S_6 = (p_1 y_1 + p_2 y_2 + p_3 y_3 + p_4 y_4 + p_5 y_5 + p_6 y_6) / \mu$
 $= \mu / \mu$
 $= 100\%$

3.3.2. Spesifikasi Model

Untuk mencapai tujuan 2 dan 3 dan untuk menguji hipotesis 1 dan 2, digunakan model regresi linear dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) model tersebut adalah:

- a. Model 1 : untuk mengetahui pengaruh rata-rata tahun bersekolah dan standar deviasi pendidikan terhadap pemerataan pendidikan : *Indeks Gini Pendidikan merupakan fungsi dari rata-rata tahun bersekolah dan penyebaran pendidikan.*

Model Umum : $IGP = f(R,S)$

Model Ekonometri : $IGP = \alpha_0 + \alpha_1 R + \alpha_2 S + e$

- b. Model 2 : untuk mengetahui pengaruh pemerataan pendidikan terhadap PDRB per kapita : *PDRB merupakan fungsi dari pemerataan pendidikan:*

Model Umum : $PDRB = f(IGP)$

Model Ekonometri : $PDRB = \alpha_0 + \alpha_1 IGP + U$

Keterangan :

IGP = Indeks Gini Pendidikan

R = rata-rata tahun bersekolah

S = standar deviasi sekolah

PDRB = PDRB per kapita

α_0	= konstanta
α_1, α_2	= koefisien variabel
e	= variabel pengganggu

3.4. Pengujian

Rentabilitas (keandalan) parameter-parameter yang diestimasi dapat dilihat melalui 3 kriteria. Pertama, kriteria ekonomi yang ditetapkan melalui teori ekonomi, yang berkaitan dengan tanda dan besaran parameternya (koefisiennya). Kriteria kedua adalah kriteria statistik, melalui signifikansi parameter secara individual, bersama-sama dan uji kesesuaian (*test of goodness of fit*). Sedangkan kriteria ketiga adalah ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi-asumsi regresi linier klasik yaitu linearitas, normalitas, non autokorelasi, non multikolinear, dan homoscedastisitas. Pendeteksian kriteria statistik dikenal dengan uji orde satu (*first order test*), sedangkan pendeteksian terhadap penyimpangan asumsi klasik disebut uji orde kedua (*second order test*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua 1997, *Indonesia – Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.
- Arief, Sritua dan Adi Sasono, 1984, *Ketergantungan dan Keterbelakangan – Sebuah Studi Kasus*, edisi kedua, Penerbit Sinar Harapan dan Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1999, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Bayhaqi, Ahmad, 2000, *Education and Macroeconomic Performance in Indonesia : A Comparison with Other ASEAN Economies*, Visiting Researchers Series No. 13(2000), World Bank.
- BPS, *DIY Dalam Angka*, kantor BPS DIY, beberapa penerbitan.
- Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Insukindro, 2002, *Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta 1984-1987*, Jurnal FE Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Irawan dan Suparmoko, 2000, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.
- Ismuningsih, Atik, 2011, *Faktor pertumbuhan Penduduk, Tingkat Melek Huruf, dan Distribusi Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Propinsi DIY, 2004 – 2009*, Skripsi, tidak dipublikasikan.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, edisi Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kamaludin, Rustian, 1998, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, penerbit FE UI, Jakarta.
- Luthfi, Muta'alif, *Ketimpangan Wilayah di Indonesia, Dalam Prospek Globalisasi Ekonomi*, Makalah seminar HIMASEPA UPN “Veteran” Yogyakarta, 11 September 1997.
- Rahayu, Astuti, 2011, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Distribusi Pendapatan di DIY, Tahun 2004 – 2009*, Penelitian, tidak dipublikasikan.

Redaksi Jendela, 2002, *Wajah Kemiskinan Indonesia*, Jendela, Vol II no. 5 Buletin STPMD APMD, Yogyakarta.

Tarigan, Robinson, 2003, *Ekonomi Regional, Teori, dan Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Thomas, Vinod, dkk., 2001, *The Quality Of Growth ; Kualitas Pertumbuhan*, Penerjemah Marcus Prihminto Widodo, diterbitkan untuk Bank Dunia, Penerbit Gramedia, Jakarta.

Todaro Michael P.dan Stephen C. Smith, 2007, *Economic Development*, 9th. Ed., London Addison Wesley, Longman Limited.

Wibowo, Novianto, 2003, *Masalah Pengentasan Kemiskinan di Indonesia- Pendekatan Hipotesis Kuznets*, Pangsa FE UGM, Edisi 10, Yogyakarta.

Lampiran :

DATA YANG SUDAH DIPEROLEH

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2000-2013

Golongan Umur	Perkotaan + Perdesaan													
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013			
10-14	98.76	98.90	98.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19	98.72	98.84	98.86	98.92	98.96	99.60	99.64	99.56	98.94	99.30	99.56	99.30	99.56	99.56
20-24	98.37	98.56	98.62	98.60	98.70	99.30	99.28	99.42	98.61	98.85	99.43	98.85	99.43	99.43
25-29	97.73	98.12	98.27	98.14	98.13	98.91	98.76	98.73	98.39	98.71	98.61	98.71	98.61	98.61
30-34	96.46	97.20	97.40	97.59	97.62	98.42	98.27	98.35	98.09	98.14	98.27	98.14	98.27	98.27
35-39	93.38	94.55	95.15	95.86	95.63	97.28	97.88	97.55	97.05	97.36	97.77	97.36	97.77	97.77
40-44	90.25	91.38	91.90	92.51	92.25	94.04	94.73	95.69	94.43	95.16	96.33	95.16	96.33	96.33
45-49	87.62	88.82	89.32	89.65	89.49	93.52	91.13	91.13	90.68	93.01	93.62	93.01	93.62	93.62
50+	69.67	70.13	72.64	74.89	78.03	75.73	77.82	78.46	78.80	79.16	81.44	79.16	81.44	81.44
Jumlah/Total	90.93	91.47	91.91	91.45	91.87	92.19	92.58	92.91	92.81	93.10	94.14	93.10	94.14	94.14
15-24	-	-	-	-	-	-	99.47	99.49	98.78	99.08	99.49	99.08	99.49	99.49
15-44	-	-	-	-	-	-	98.20	98.29	97.70	97.99	98.39	97.99	98.39	98.39
15+	-	-	-	-	-	-	-	92.91	92.81	93.10	94.14	93.10	94.14	94.14
45+	-	-	-	-	-	-	81.32	81.75	82.11	82.89	84.76	82.89	84.76	84.76

Sumber : http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=8

Angka Partisipasi Sekolah (A P S) Menurut Provinsi Tahun 2003-2013

Provinsi	2003				2004				2005			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
Aceh	98.05	92.89	72.25	17.12	98.67	94.99	73.31	18.68	*	*	*	*
Sumatera Utara	98.25	88.51	63.19	12.20	97.64	90.28	66.42	11.75	98.04	90.55	65.77	13.12
Sumatera Barat	96.94	86.70	63.23	20.77	97.11	88.73	66.41	22.33	97.04	89.24	67.12	21.40
R i a u	97.03	87.57	60.42	9.67	97.27	89.29	60.03	10.20	98.27	90.64	62.39	12.61
Kepulauan Riau	*	*	*	*	*	*	*	*	97.45	88.30	58.05	9.02
Jambi	97.28	82.61	52.89	11.09	97.06	86.23	55.54	9.22	97.84	84.13	53.39	9.39
Sumatera Selatan	96.50	78.65	44.57	10.08	97.24	83.58	51.06	11.46	97.85	86.28	52.70	11.32
Kep Bangka Belitung	96.07	74.17	44.19	3.88	95.30	77.25	48.22	4.73	96.81	78.05	50.86	8.93
Bengkulu	96.28	78.93	52.38	13.39	97.43	87.83	61.88	11.83	97.15	83.05	57.62	13.96
Lampung	96.07	83.43	48.31	8.82	96.69	84.35	48.19	7.65	96.95	86.27	51.14	9.76
DKI Jakarta	98.21	91.81	71.57	18.27	98.40	92.63	70.36	20.34	98.67	92.00	65.81	18.92
Jawa Barat	96.27	75.86	43.53	9.19	96.50	78.16	45.08	9.29	96.28	76.44	45.51	9.61
Banten	96.80	79.11	45.68	10.21	96.88	81.89	51.39	11.05	97.09	78.98	51.87	10.98
Jawa Tengah	97.90	82.36	48.13	10.06	98.04	84.30	51.02	10.45	98.34	87.79	52.97	10.84
DI Yogyakarta	98.67	95.10	73.58	42.29	98.77	95.02	75.96	47.00	99.05	95.16	74.86	41.21
Jawa Timur	97.18	81.99	51.71	11.13	97.43	84.63	52.80	11.59	97.96	87.56	55.63	11.44
B a i	97.29	86.06	62.02	13.61	98.11	86.36	63.31	10.75	97.41	83.90	61.27	14.82
Nusa Tenggara Barat	94.72	72.27	42.97	6.48	94.67	76.47	47.26	10.05	96.02	81.62	51.22	11.39
Nusa Tenggara Timur	90.77	71.65	37.79	9.29	93.23	77.49	45.35	9.98	94.30	75.74	43.69	10.69

Angka Partisipasi Sekolah (A P S) Menurut Provinsi Tahun 2003-2013

Provinsi	2006				2007**				2008**			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
Aceh	98.88	93.83	72.43	20.95	98.95	94.06	72.79	23.60	99.03	94.15	72.73	23.13
Sumatera Utara	98.19	90.62	65.09	13.22	98.37	90.73	65.87	14.42	98.66	91.10	65.87	14.60
Sumatera Barat	97.71	88.45	64.29	18.29	97.78	88.52	65.35	20.88	98.07	88.70	65.73	21.22
R i a u	97.68	91.15	62.87	12.33	97.94	91.14	63.92	13.44	98.36	91.83	64.11	13.77
Kepulauan Riau	97.78	90.36	63.24	5.96	97.88	91.34	64.26	7.58	98.31	91.10	64.62	10.99
Jambi	97.20	83.77	53.75	10.41	97.28	84.53	55.39	12.31	97.59	84.78	55.72	12.77
Sumatera Selatan	96.84	83.43	52.77	10.35	97.55	84.26	54.43	12.04	97.88	84.55	54.27	12.30
Kep Bangka Belitung	96.26	79.04	44.95	6.07	96.30	80.38	46.90	8.41	96.76	79.71	47.31	8.75
Bengkulu	98.10	86.75	58.77	14.77	98.25	86.93	59.00	16.46	98.38	87.42	58.64	16.07
Lampung	97.77	84.14	49.47	7.26	97.90	84.99	50.02	8.71	98.26	85.10	50.69	9.06
DKI Jakarta	98.46	90.16	60.26	15.84	98.73	90.53	61.49	17.18	98.82	90.53	61.86	17.75
Jawa Barat	97.64	79.70	45.62	8.88	97.84	80.36	47.57	10.20	98.24	81.00	47.58	10.54
Banten	97.36	80.35	48.65	10.36	97.55	81.08	51.05	11.34	97.75	81.28	50.35	11.66
Jawa Tengah	98.47	83.41	51.31	9.26	98.67	84.03	53.20	10.28	98.83	84.27	53.36	10.55
DI Yogyakarta	99.35	90.55	71.18	39.71	99.29	92.62	71.82	43.38	99.62	92.91	72.46	43.47
Jawa Timur	98.22	85.99	56.79	10.28	98.39	86.40	58.26	11.50	98.63	86.54	58.14	11.63
B a l i	98.27	87.16	63.21	10.98	98.36	87.59	63.38	13.10	98.45	88.07	63.36	13.53
Nusa Tenggara Barat	96.75	84.84	55.62	12.92	97.07	85.24	57.30	14.84	97.25	85.57	57.22	14.60
Nusa Tenggara Timur	94.00	77.24	46.51	11.62	93.73	78.11	49.58	14.42	93.72	77.76	49.67	14.38

Angka Partisipasi Sekolah

Provinsi	2012				2013			
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
Aceh	99.36	94.34	74.59	28.55	99.66	95.23	74.70	29.18
Sumatera Utara	98.60	90.83	69.86	17.27	99.03	92.11	71.24	21.81
Sumatera Barat	98.34	90.50	71.24	27.55	98.81	92.20	74.10	30.66
Riau	98.13	88.01	66.55	15.81	98.59	90.35	69.79	22.04
Kepulauan Riau	98.44	94.93	70.94	10.14	98.63	96.67	73.66	14.85
Jambi	98.70	91.11	59.71	15.22	98.81	91.96	63.97	20.25
Sumatera Selatan	98.11	88.75	58.66	13.91	98.57	89.47	60.74	14.08
Kep Bangka Belitung	97.72	84.09	52.02	9.30	98.13	84.63	56.42	9.46
Bengkulu	98.97	93.22	67.76	19.64	99.50	93.16	71.21	24.12
Lampung	98.64	90.00	60.43	11.90	99.03	91.06	64.41	16.19
DKI Jakarta	99.04	94.07	61.87	18.02	99.40	95.47	66.09	19.65
Jawa Barat	98.36	88.68	56.30	12.25	98.85	89.40	59.98	17.34
Banten	98.26	91.10	59.80	15.97	98.60	91.32	62.89	18.08
Jawa Tengah	98.87	89.59	58.65	11.83	99.28	90.73	59.88	17.42
DI Yogyakarta	99.77	98.35	80.04	44.69	99.96	96.79	81.41	45.86
Jawa Timur	98.65	91.62	61.87	14.59	99.05	92.83	62.32	19.49
Bali	99.18	95.04	71.44	18.99	99.26	95.90	74.03	19.84
Nusa Tenggara Barat	98.18	91.25	61.07	17.82	98.20	92.23	66.40	22.64
Nusa Tenggara Timur	96.15	88.62	61.92	17.92	97.34	89.43	64.81	22.88

Provinsi	2003					2004					2005				
	7-12	13-15	16-18	19-24		7-12	13-15	16-18	19-24		7-12	13-15	16-18	19-24	
Kalimantan Barat	92.05	81.17	44.95	9.83	95.42	82.91	45.69	8.96	95.50	80.42	47.55	8.68			
Kalimantan Tengah	97.74	85.24	50.29	9.45	98.42	88.41	50.35	8.12	98.48	91.14	52.66	9.67			
Kalimantan Selatan	96.34	73.47	41.44	9.57	96.68	78.56	47.52	8.16	97.86	75.79	46.24	10.32			
Kalimantan Timur	96.65	88.60	61.30	11.69	97.66	90.70	64.97	12.56	97.82	89.11	61.75	11.97			
Sulawesi Utara	97.38	83.91	54.32	13.10	96.68	85.41	60.70	14.30	98.15	87.96	57.18	10.50			
Gorontalo	90.58	66.86	35.10	8.82	91.53	67.00	39.20	9.52	92.95	69.34	42.62	8.40			
Sulawesi Tengah	96.60	72.82	44.23	8.69	96.04	77.65	46.87	10.85	96.76	79.70	45.62	10.34			
Sulawesi Selatan	92.41	69.48	45.41	14.94	93.34	73.54	46.91	13.80	94.88	76.13	49.34	14.49			
Sulawesi Barat	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
Sulawesi Tenggara	95.50	79.33	47.32	10.94	94.82	80.80	53.15	11.11	96.87	86.53	56.13	15.17			
Maluku	95.65	85.43	55.68	12.32	97.17	92.25	66.15	13.66	98.26	91.93	67.74	12.63			
Maluku Utara	97.41	87.55	50.93	8.64	96.79	88.33	52.56	10.71	97.91	86.85	63.84	11.27			
Papua	85.75	75.19	49.38	8.16	86.64	78.31	51.47	9.23	86.32	74.93	53.40	9.58			
Papua Barat	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
Indonesia	96.42	81.01	50.97	11.71	96.77	83.49	53.48	12.07	97.14	84.02	53.86	12.23			

Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2013

Note: * data tidak tersedia

** Mulai tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APS mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

*** Penurunan beberapa indikator pendidikan dibandingkan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:

1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflasi tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,...) sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflasinya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.
2. Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada tahun 2011 dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
3. Data tahun 2011-2013 diestimasi dengan menggunakan inflasi hasil back-casting berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035

Provinsi	2003					2004					2005					
	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
Kalimantan Barat	92.05	81.17	44.95	9.83	95.42	82.91	45.69	8.96	95.50	80.42	47.55	8.68	95.50	80.42	47.55	8.68
Kalimantan Tengah	97.74	85.24	50.29	9.46	98.42	88.41	50.35	8.12	98.48	91.14	52.66	9.67	98.48	91.14	52.66	9.67
Kalimantan Selatan	96.34	73.47	41.44	9.57	96.68	78.56	47.52	8.16	97.86	75.79	46.24	10.32	97.86	75.79	46.24	10.32
Kalimantan Timur	96.65	88.60	61.30	11.69	97.66	90.70	64.97	12.56	97.82	89.11	61.75	11.97	97.82	89.11	61.75	11.97
Sulawesi Utara	97.38	83.91	54.32	13.10	96.68	85.41	60.70	14.30	98.15	87.96	57.18	10.50	98.15	87.96	57.18	10.50
Gorontalo	90.58	66.86	35.10	8.82	91.53	67.00	39.20	9.52	92.95	69.34	42.62	8.40	92.95	69.34	42.62	8.40
Sulawesi Tengah	96.60	72.82	44.23	8.69	96.04	77.65	46.87	10.85	96.76	79.70	45.62	10.34	96.76	79.70	45.62	10.34
Sulawesi Selatan	92.41	69.48	45.41	14.94	93.34	73.54	46.91	13.80	94.88	76.13	49.34	14.49	94.88	76.13	49.34	14.49
Sulawesi Barat	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Sulawesi Tenggara	95.50	79.33	47.32	10.94	94.82	80.80	53.15	11.11	96.87	86.53	56.13	15.17	96.87	86.53	56.13	15.17
Maluku	95.65	85.43	55.68	12.32	97.17	92.25	66.15	13.66	98.26	91.93	67.74	12.63	98.26	91.93	67.74	12.63
Maluku Utara	97.41	87.55	50.93	8.64	96.79	88.33	52.56	10.71	97.91	86.85	63.84	11.27	97.91	86.85	63.84	11.27
Papua	85.75	75.19	49.38	8.16	86.64	78.31	51.47	9.23	86.32	74.93	53.40	9.58	86.32	74.93	53.40	9.58
Papua Barat	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Indonesia	96.42	81.01	50.97	11.71	96.77	83.49	53.48	12.07	97.14	84.02	53.86	12.23	97.14	84.02	53.86	12.23

Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2013

Note: * data tidak tersedia

** Mulai tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APS mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

*** Penurunan beberapa indikator pendidikan dibandingkan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:

1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflasi tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,...) sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflasinya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.
2. Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada tahun 2011 dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.

3. Data tahun 2011-2013 diestimasi dengan menggunakan inflasi hasil back-casting berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=3

Provinsi	2005				2006				2007**				2008**			
	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18
Kalimantan Barat	8.68	96.53	83.46	48.55	9.30	96.71	84.08	50.17	11.03	97.08	84.50	50.73	11.03	97.08	84.50	50.73
Kalimantan Tengah	9.67	98.33	86.08	53.39	9.32	98.31	86.47	54.14	10.49	98.45	86.42	53.64	10.49	98.45	86.42	53.64
Kalimantan Selatan	10.32	96.36	78.41	48.75	9.50	97.21	78.99	50.01	11.21	97.48	79.68	50.30	11.21	97.48	79.68	50.30
Kalimantan Timur	11.97	97.51	89.91	64.03	13.10	98.12	90.62	64.58	14.41	98.35	90.78	64.71	14.41	98.35	90.78	64.71
Sulawesi Utara	10.50	97.37	88.01	55.84	11.15	97.55	88.14	56.98	12.09	97.87	88.46	56.84	12.09	97.87	88.46	56.84
Gorontalo	8.40	93.39	75.84	47.60	7.96	93.62	77.91	50.30	12.82	94.23	77.68	50.17	12.82	94.23	77.68	50.17
Sulawesi Tengah	10.34	97.12	80.74	47.90	12.35	96.82	80.96	50.54	14.19	97.16	81.13	50.75	14.19	97.16	81.13	50.75
Sulawesi Selatan	14.49	95.08	78.40	50.85	12.88	95.40	79.25	52.52	15.99	95.71	78.99	52.29	15.99	95.71	78.99	52.29
Sulawesi Barat		94.02	74.13	42.80	7.44	94.13	75.89	44.05	10.07	94.53	75.75	45.68	10.07	94.53	75.75	45.68
Sulawesi Tenggara	15.17	97.04	85.22	58.19	14.64	97.31	85.48	58.58	16.09	97.66	85.62	59.17	16.09	97.66	85.62	59.17
Maluku	12.63	97.55	90.61	70.39	15.86	97.24	91.10	72.63	17.70	97.52	91.20	71.95	17.70	97.52	91.20	71.95
Maluku Utara	11.27	97.35	88.37	61.85	14.40	96.71	88.94	63.38	15.72	96.80	89.20	63.39	15.72	96.80	89.20	63.39
Papua	9.58	80.38	77.54	53.64	13.50	83.36	78.01	54.72	15.88	83.38	78.22	54.13	15.88	83.38	78.22	54.13
Papua Barat		90.94	88.38	56.00	11.53	93.17	88.58	57.61	13.13	93.38	88.55	58.15	13.13	93.38	88.55	58.15
Indonesia	12.23	97.39	84.08	53.92	11.38	97.64	84.65	55.49	13.08	97.88	84.89	55.50	13.08	97.88	84.89	55.50

Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2013

Note: * data tidak tersedia

** Mulai tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APS mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

*** Penurunan beberapa indikator pendidikan dibandingkan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:

1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflasi tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,...)

sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflasinya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.

2. Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada tahun 2011 dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.

3. Data tahun 2011-2013 diestimasi dengan menggunakan inflasi hasil back-casting berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subjek=28¬ab=3

Provinsi	2008**				2009**				2010**				2011**			
	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18
Kalimantan Barat	10.62	96.94	83.92	49.83	10.17	97.04	84.48	50.35	11.43	96.28	83.94	50.17				
Kalimantan Tengah	11.15	98.50	86.64	53.65	10.16	98.70	86.83	54.50	11.06	98.12	85.53	55.75				
Kalimantan Selatan	11.40	97.59	79.83	49.43	11.20	97.90	80.59	50.23	12.18	97.75	83.05	53.89				
Kalimantan Timur	14.43	98.42	91.55	64.07	13.97	98.68	92.49	64.76	14.88	98.62	92.40	69.10				
Sulawesi Utara	12.80	97.82	88.40	56.56	12.07	98.30	89.06	56.75	13.30	98.02	87.59	60.77				
Gorontalo	13.01	96.55	80.94	48.77	11.10	96.86	81.78	49.61	12.87	96.91	83.75	58.14				
Sulawesi Tengah	14.75	97.22	83.41	49.30	13.43	97.52	84.17	50.06	14.69	97.00	85.32	59.49				
Sulawesi Selatan	16.08	96.53	80.96	51.67	15.79	97.00	82.63	53.00	18.64	97.22	84.67	57.15				
Sulawesi Barat	10.20	95.71	77.09	43.58	9.10	95.93	77.92	44.54	10.47	95.86	82.69	57.30				
Sulawesi Tenggara	16.08	97.69	87.20	59.19	16.45	97.81	88.17	59.93	18.28	97.36	86.89	62.29				
Maluku	18.13	97.87	91.98	72.28	19.24	98.27	92.85	72.40	21.88	98.39	92.07	67.34				
Maluku Utara	16.60	96.85	90.02	63.38	15.67	97.23	90.76	64.12	17.04	97.15	90.11	65.12				
Papua	15.68	76.09	73.68	47.51	12.45	76.22	74.35	48.28	13.18	72.63	70.42	49.69				
Papua Barat	14.70	93.35	88.59	57.95	12.72	94.43	90.25	60.12	14.66	94.49	88.40	65.55				
Indonesia	13.29	97.95	85.47	55.16	12.72	98.02	86.24	56.01	13.77	97.62	87.99	57.95				

Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2013

Note: * data tidak tersedia

** Mulai tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APS mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

*** Penurunan beberapa indikator pendidikan dibandingkan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:

1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflasi tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,...) sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflasinya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.
2. Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada tahun 2011 dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
3. Data tahun 2011-2013 diestimasi dengan menggunakan inflasi hasil back-casting berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=3

Provinsi	2011**				2012				2013				
	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24	7-12	13-15	16-18	19-24
Kalimantan Barat	11.94	96.66	85.52	55.13	14.17	96.91	85.94	58.80	19.27	96.91	85.94	58.80	19.27
Kalimantan Tengah	13.05	98.62	85.68	55.06	14.04	99.05	86.14	59.18	19.89	99.05	86.14	59.18	19.89
Kalimantan Selatan	13.62	97.85	85.62	58.16	16.48	98.76	86.60	60.19	16.95	98.76	86.60	60.19	16.95
Kalimantan Timur	16.92	99.12	96.32	71.73	20.33	99.46	96.49	73.92	25.04	99.46	96.49	73.92	25.04
Sulawesi Utara	15.16	98.16	88.34	65.28	16.12	98.92	90.48	66.88	16.36	98.92	90.48	66.88	16.36
Gorontalo	19.85	97.74	82.91	59.37	20.46	97.90	86.23	59.91	23.27	97.90	86.23	59.91	23.27
Sulawesi Tengah	16.72	96.87	85.81	61.05	16.74	97.70	87.49	66.12	21.76	97.70	87.49	66.12	21.76
Sulawesi Selatan	21.46	97.62	87.85	62.16	23.17	98.24	89.66	62.67	27.80	98.24	89.66	62.67	27.80
Sulawesi Barat	13.03	96.19	82.17	56.80	14.65	95.20	84.55	59.62	18.04	95.20	84.55	59.62	18.04
Sulawesi Tenggara	21.48	97.57	88.25	65.04	23.62	98.00	89.12	65.84	24.00	98.00	89.12	65.84	24.00
Maluku	26.72	98.27	94.76	68.33	28.98	98.79	94.44	70.28	33.80	98.79	94.44	70.28	33.80
Maluku Utara	19.33	98.31	90.83	69.01	21.79	98.02	93.40	69.04	26.42	98.02	93.40	69.04	26.42
Papua	12.82	75.45	69.07	50.01	13.86	75.23	72.64	53.19	17.50	75.23	72.64	53.19	17.50
Papua Barat	16.44	95.59	91.13	65.04	20.03	95.59	92.94	71.89	24.10	95.59	92.94	71.89	24.10
Indonesia	14.82	98.02	89.76	61.49	16.05	98.42	90.81	63.84	20.14	98.42	90.81	63.84	20.14

Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2013

Note: * data tidak tersedia

** Mulai tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya APS mencakup pendidikan non formal (paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA)

*** Penurunan beberapa indikator pendidikan dibandingkan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:

1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflasi tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,...) sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflasinya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.

mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan

karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.

3. Data tahun 2011-2013 diestimasi dengan menggunakan inflasi hasil back-casting berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=3

Indikator Pendidikan, 1994-2013

Indikator	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{****)}	2012	2013
PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL											
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	96.42	96.77	97.14	97.39	97.60	97.83	97.95	97.97	97.53	97.94	98.34
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	81.01	83.49	84.02	84.08	84.26	84.41	85.43	86.11	87.79	89.61	90.62
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	50.97	53.48	53.86	53.92	54.61	54.70	55.05	55.83	57.69	61.30	63.64
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	11.71	12.07	12.23	11.38	12.20	12.43	12.66	13.67	14.47	15.94	20.04
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105.82	107.13	106.63	109.96	110.35	109.41	110.35	111.63	102.42	104.23	107.63
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	81.09	82.24	82.09	81.87	82.03	81.38	81.09	80.35	89.37	89.29	85.69
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA	50.89	54.38	55.21	56.69	56.71	57.42	62.37	62.53	64.10	68.45	66.27
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT	10.84	10.73	11.06	12.16	13.31	14.42	14.59	16.35	18.06	18.85	23.06
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92.55	93.04	93.25	93.54	93.75	93.99	94.37	94.72	90.98	92.47	95.52
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	63.49	65.24	65.37	66.52	66.64	66.98	67.40	67.62	68.22	70.82	73.73
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	40.56	42.96	43.50	43.77	44.56	44.75	45.06	45.48	47.93	51.77	54.12
Angka Partisipasi Murni (APM) PT	8.55	8.57	8.71	8.87	9.64	10.07	10.30	11.01	12.56	13.48	18.08
PARTISIPASI PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL^{***)}											
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 th	*	*	*	*	97.64	97.88	97.95	98.02	97.62	98.02	98.42
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	*	*	*	*	84.65	84.89	85.47	86.24	87.99	89.76	90.81
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	*	*	*	*	55.49	55.50	55.16	56.01	57.95	61.49	63.84
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 19-24 th	*	*	*	*	13.08	13.29	12.72	13.77	14.82	16.05	20.14
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	*	*	*	*	112.19	111.12	110.42	111.68	102.57	104.33	107.71
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	*	*	*	*	86.37	86.86	81.25	80.59	89.83	89.49	85.96
Angka Partisipasi Kasar (APK) SM/MA/Paket C	*	*	*	*	59.46	59.06	62.55	62.85	64.90	68.80	66.61

Indikator	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 ^{***}	2012	2013
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	*	*	*	*	93.78	93.99	94.37	94.76	91.07	92.54	95.59
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	*	*	*	*	66.90	67.39	67.43	67.73	68.35	70.93	73.88
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA/Paket C	*	*	*	*	44.84	44.97	45.11	45.59	48.07	51.88	54.25
Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas											
Tidak/belum sekolah	9.62	8.98	8.85	8.34	8.59	8.24	7.50	7.28	6.73	6.11	5.77
Tidak tamat SD	15.74	15.31	15.23	14.99	14.42	14.98	14.86	12.74	15.08	14.30	14.13
SD/ sederajat	33.22	31.87	32.07	31.00	30.43	29.08	29.31	29.72	28.48	28.09	28.18
SMP/ sederajat	19.00	20.12	19.48	19.88	19.83	20.23	19.85	20.57	20.21	20.59	20.51
SM +/-sederajat	22.41	23.72	24.37	25.78	26.73	27.46	28.49	29.69	29.50	30.91	31.41
Partisipasi Pra Sekolah (sedang)											
Usia 3-4 th	12.78	12.96	14.58	15.23	12.26	13.45	17.15	19.41	15.95	18.20	18.02
Usia 5-6 th	23.79	24.08	26.54	23.74	21.83	27.07	27.22	27.19	33.40	35.54	37.18
Usia 3-6 th	18.27	18.36	20.64	19.53	16.71	20.23	22.04	23.22	24.50	26.72	27.55
Partisipasi Pra Sekolah (pernah + sedang)											
Usia 3-4 th	12.78	12.96	14.58	15.23	14.68	16.09	20.19	22.59	19.70	22.09	22.20
Usia 5-6 th	32.39	33.21	34.85	37.77	37.57	41.78	49.41	53.38	54.61	57.38	59.83
Usia 3-6 th	22.56	22.80	24.85	26.64	25.32	28.87	34.39	37.68	36.81	39.43	40.92
BUTA HURUF											
Angka Buta Huruf10 th +	9.07	8.53	8.09	7.61	7.26	6.95	6.59	6.34	6.80	6.28	5.46
Angka Buta Huruf15 th +	10.21	9.62	9.09	8.55	8.13	7.81	7.42	7.09	7.56	7.03	6.08
Angka Buta Huruf15-44 th	3.88	3.30	3.09	2.89	2.96	1.95	1.80	1.71	2.31	2.03	1.61
Angka Buta Huruf45 th +	25.43	24.87	22.83	21.09	18.94	19.59	18.68	18.25	18.15	17.17	15.15

Sumber: BPS-RI, Susenas 1994-2013

Ket: * data tidak tersedia

** Pendidikan non formal yang dicakup adalah paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA

Indikator	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA/Paket C	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas										
Tidak/belum sekolah	13.79	14.47	13.63	11.93	11.54	11.23	11.00	11.65	9.81	9.62
Tidak tamat SD	22.34	23.04	20.88	19.49	19.49	18.71	18.04	17.53	16.17	15.74
SD/ sederajat	32.82	31.71	32.73	33.11	33.16	32.57	32.33	33.03	33.40	33.22
SMP/ sederajat	14.51	14.17	15.05	16.43	16.27	16.97	17.54	17.07	18.21	19.00
SM +/ sederajat	16.53	16.61	17.71	19.04	19.55	20.51	21.09	20.71	22.41	22.41
Partisipasi Pra Sekolah (sedang)										
Usia 3-4 th	*	*	*	*	*	*	*	14.46	13.38	12.78
Usia 5-6 th	*	*	*	*	*	*	*	29.03	24.84	23.79
Usia 3-6 th	*	*	*	*	*	*	*	21.96	19.25	18.27
Partisipasi Pra Sekolah (pernah + sedang)										
Usia 3-4 th	*	*	*	*	*	*	*	14.46	13.38	12.78
Usia 5-6 th	*	*	*	*	*	*	*	35.02	32.37	32.39
Usia 3-6 th	*	*	*	*	*	*	*	25.04	23.11	22.56
BUTA HURUF										
Angka Buta Huruf10 th +	12.74	13.74	12.65	10.93	10.58	10.21	10.08	10.73	9.29	9.07
Angka Buta Huruf15 th +	14.84	15.95	14.66	12.59	12.11	11.63	11.42	12.11	10.49	10.21
Angka Buta Huruf15-44 th	6.90	7.45	6.89	5.54	5.15	4.63	4.50	4.78	3.75	3.88
Angka Buta Huruf45 th +	36.06	37.80	34.54	31.00	29.74	28.83	28.54	30.31	26.84	25.43

Sumber: BPS-Ri, Susenas 1994-2013

Ket: * data tidak tersedia

** Pendidikan non formal yang dicakup adalah paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/SMK/MA

*** Kenalkan Angka Buta Huruf serta penurunan beberapa indikator pendidikan perbandingan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:

1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan inflasi tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,...) sedangkan pada tahun 2011, penghitungan inflasinya berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.
2. Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu bulan Juli, dan pada 2011 dilakukan triwulanan. Ini mempengaruhi penghit indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.
3. Data tahun 2011-2013 diestimasi dengan menggunakan inflasi hasil back-casting berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035

sumber : http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=28¬ab=1

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2013

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PRODUK DOMESTIK BRUTO*	1 389 769.9	1 440 405.7	1 505 216.4	1 577 171.3	1 656 516.8	1 750 815.2	1 847 126.7	1 964 327.3	2 082 456.1
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	1 218 334.1	1 278 060.0	1 344 906.3	1 421 474.8	1 506 296.6	1 605 261.8	1 703 422.4	1 821 757.7	1 939 625.9

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=11¬ab=3

Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2000-2013

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*	2013**
PRODUK DOMESTIK BRUTO	2 178 850.4	2 314 458.8	2 464 566.1	2 618 938.4	2 770 345.1
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	2 036 685.5	2 171 113.5	2 322 653.1	2 481 796.7	2 636 976.0

Catatan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=11¬ab=3



**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**



Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur, Yogyakarta 55283
Telp. FE. : (0274) 486255, 487276 Jur. EM. : 487275 Jur. EP. : 487274 Jur. EA. 487273 Fax. (0274) 486255

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin /183/ VI/ 2014 / FE.2

Atas Dasar : Surat Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan
Nomor: B/43a/VI/2012/EP tanggal 19 Juni 2014

DIPERINTAHKAN

Kepada : Tenaga Pengajar Fakultas Ekonomi yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama : Astuti Rahayu, SE., M.Si
NPY. : 27209 97 0173 1
Jabatan : Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan

Untuk : a. Melakukan Penelitian dengan judul : *Kemerataan Pendidikan di Indonesia 1992-2012*
b. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab
c. Melapor Kepada Dekan setelah melaksanakan Surat Perintah ini.
d. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Juni 2014

DEKAN

